



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MAMBERAMO
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**JAKARTA,
JUMAT, 29 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 35/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Tahun 2020

PEMOHON

1. Dorinus Dasinapa, Andris Paris Yosafat Maay (Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Robby Wilson Rumansara, Lukas Jantje Puny (Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Kristian Wanimbo, Yonas Tasti (Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Mamberamo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 29 Januari 2021, Pukul 09.34 – 10.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Billy Maecelino Maniagasi
2. Edward Erens Naman
3. Tommy Albert Lumban Tobing

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Achmad Husein Borut
2. Yofnedi
3. Cosmas E Refra
4. Gilbert Marciano Tulaar
5. Iman Ali Rahman

C. Pemohon Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Kristian Wanimbo
2. Yonas Tasti

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, 72/PHP.BUP-XIX/2021, 35/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Latifah Anum Siregar
2. Wehelmina Morin
3. Helmi

E. Termohon:

1. Bapak Theodorus Kossay (Ketua KPU Mamberamo Raya)
2. Bapak Melkianus Kambu (KPU Mamberamo Raya)
3. Diana D. Simbiak (KPU Mamberamo Raya)

F. Bawaslu:

1. Cornelia H. Mamoribo (Ketua Bawaslu Mamberamo Raya)
2. Ronald Manoach (Anggota Bawaslu Provinsi Papua)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.34 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini, sesi ke-2, untuk sidang pilkada, untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021. Dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Billy Marcelino Maniagasi, S.H., hadir sebagai Kuasa Pemohon. Kemudian, rekan saya di belakang, Tommy Albert Lumban Tobing, saudara Edward Erens Naman, daring dari Kota Jayapura bersama dengan partisan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Achmad Husein Borut dan Yofnedi, S.H. Kemudian, Pak Cosmas Refra, Gilbert Marciano Tulaar, dan Pak Iman Ali Rahman, S.H., M.H. Kami dari Kuasa Hukum Paslon Nomor 2, Bapak Robby Rumansara dan Pak Lukas Jantje Puny.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021? Tidak hadir, ya? Atau melalui daring? Pemohon Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021? Tidak ada? Baik.

Sekarang ... ini karena 3 nomor ini sama sama dari Mamberamo, berarti KPU-nya satu. Silakan, memperkenalkan diri! Mungkin sekaligus untuk 3 perkara, Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021, 72/PHP.BUP-XIX/2021, 35/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari KPU Mamberamo Raya, saya sendiri, Latifah Anum Siregar, kemudian masing-masing sebelah kanan saya, Wehelmina Morin, dan paling ujung, Helmi.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021, 72/PHP.BUP-XIX/2021, 35/PHP.BUP-XIX/2021: LATIFAH ANUM SIREGAR

Bersama kami, hadir komisioner KPU Mamberamo Raya, beliau adalah KPU Provinsi Papua selaku KPU Mamberamo Raya. Di belakang kami, Ketua KPU, Bapak Theodorus Kossay. Kemudian, bersama 2 komisioner, Bapak Melkianus Kambu dan Ibu Diana D. Simbiak, dan juga komisioner KPU lainnya yang mengikuti secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Demikian juga Bawaslu, mungkin sekaligus ya, untuk 3 perkara. Bawaslu Mamberamo Raya, silakan!

12. BAWASLU PROVINSI PAPUA: RONALD MANOACH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Bawaslu Papua hadir untuk Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021. Di sebelah kanan saya ada Ketua Bawaslu Mamberamo Raya, Ibu Cornelia Mamoribo dan saya sendiri Ronald Manoach, Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon ketiga perkara ini. Kemudian, pengesahan alat bukti, dan ketiga, penetapan Pihak Terkait.

Langsung saja, Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan! Waktu sekitar 10 menit.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Izinkan kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membacakan ringkasan dari permohonan kami.

Pertama, izinkan kami menjelaskan terkait kewenangan absolut dari persidangan yang mulia ini bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, perkara perselisihan penetapan hasil pemilu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang kami ajukan ini adalah terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon, dalam hal ini KPU Mamberamo Raya.

Kedua, izinkan kami menerangkan mengenai legal standing kami sebagai Pemohon bahwa Dorinus Dasinapa dan Andris Paris Yosafat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor Urut 1 sebagaimana penetapan KPU Nomor 66 dan Nomor 67 tahun 2020. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota, dan walikota wilayah pemilihan yang berjumlah penduduk kurang dari 250.000, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemungutan suara adalah perbedaan suara paling

banyak 2% dari total suara sah, penghitungan suara tahap akhir. Bahwa sekalipun perbedaan suara antara Pemohon dan pasangan yang ditetapkan Termohon lebih dari 2%, namun angka ini masih bersifat sementara, mengingat masih sangat tergantung pada 2 hal. Yakni:

1. Proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif pada saat permohonan perselisihan hasil pemilihan ini diajukan ke persidangan, Yang Mulia. Proses penanganan laporan pelanggaran administratif pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif yang diajukan Pemohon ke Bawaslu kabupaten yang ini sedang ditindaklanjuti sidang pemeriksaan pelimpahan kepada Gakkumdu di Polda Papua dan izin informasi, Yang Mulia, beberapa hari yang lalu sudah diputus untuk masalah ini, hanya kami belum mendapat salinan putusannya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Di bagian ketiga kami akan menjelaskan terkait permohonan ini diajukan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang, yakni 3 hari kerja sejak ditetapkan oleh Termohon. Bahwa dalam perkara ini, Termohon menetapkan rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal 16 Desember 2020, sedangkan permohonan ini telah diajukan pada tanggal 19 Desember 2020 yang merupakan hari libur atau dihitung berdasarkan perhitungan hari kerja, maka permohonan ini demi hukum dihitung diajukan pada hari kerja kedua sejak ditetapkan oleh Termohon.

Di bagian keempat, izin kami menjelaskan pokok dari permohonan ini. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 4.929. Sedangkan menurut Pemohon, jika penyelenggara dilakukan tanpa terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebesar 7.697. Dan pihak yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon adalah sebesar 7.249. Dan berdasarkan angka tersebut, maka seharusnya, Pemohonlah yang ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Berdasarkan temuan Pemohon, selisih antara hasil yang ditetapkan Termohon dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon dapat terjadi karena pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di 8 distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Akan kami uraikan sebagai berikut, Yang Mulia.
 - a. Pilkada berjalan dengan nihilnya fasilitas Termohon, terlihat dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU 2017 yang mewajibkan calon berstatus pegawai negeri sipil untuk menyampaikan keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang selambat-

lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Jika Termohon bersikap imparial, maka seharusnya calon pasangan yang melanggar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta pilkada.

- c. Yang Mulia. Bahwa terdapat ... bahwa terdapat praktik kotor politik uang dalam Pilkada Mamberamo Raya yang mengakibatkan selisih perolehan suara yang signifikan di 4 distrik, yakni Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hulu. Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada panwas distrik maupun kepada panwas kabupaten, namun tidak dilanjutkan di pleno distrik maupun di pleno kabupaten.
- d. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam formulir (...)

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Izin.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Anda bacakan ini permohonan yang mana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Siap, Yang Mulia!

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dari tadi disampaikan? Saya buka-buka yang Saudara baca perbaikan permohonan itu beda sekali, ya. Tolong ambil dari sini saja, pokok-pokok yang Anda ambil itu dari perbaikan permohonan atau permohonan awal?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Perbaikan permohonan, Yang Mulia. Saya rangkum saja, biar singkat.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi ini enggak di sini. 8 distrik, kemudian itu enggak kelihatan di sini, ya. Diambil dari sini saja pokok-pokoknya, ya!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Izin, Yang Mulia, ada.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan diambil dari situ!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI

Siap. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C-1 KPU ini dikarenakan ketua KPPS dan panwas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salinan formulir Model A-3 KPU, Model A-4 KPU, dan Model A.DPK KPU salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, salinan sertifikat hasil perhitungan suara bahwa dalam hal ini pihak panwas dan bawaslu kabupaten tidak memperhatikan dan mengindahkan adanya keberatan terhadap hal-hal di atas.

Bahwa tindakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.

Majelis Hakim yang kami muliakan, berikut ini kami menjelaskan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi pada pemilihan di masing-masing per distrik. Pertama, Distrik Mamberamo Hulu terdapat 2 pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yakni pada TPS 03, pihak KPPS, panwas, TPS, dan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 melakukan pencoblosan surat suara dan melakukan pengancaman terhadap pelarangan saksi ... pengancaman serta pelarangan untuk Saksi Nomor Urut 1 masuk ke dalam TPS. Pada TPS tersebut Pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan seluruh suara sah, sedangkan pasangan nomor urut lainnya mendapat suara 0 suara. Panwas TPS mengetahui hal ini, namun dibiarkan. Izin, Yang Mulia. Panwas TPS mengetahui hal ini, namun dibiarkan dan tidak dijadikan temuan dalam Pleno distrik maupun Pleno kabupaten.

1. Pada TPS Nomor 02 Kampung Dabra terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anggota panwas yang merupakan penamparan oleh salah satu anggota KPPS. Tindakan kekerasan yang dialami oleh panwas sesaat setelah dia melakukan teguran kepada anggota KPPS yang melakukan pencoblosan sejumlah surat suara secara melawan hukum dan tanpa hak.
2. Distrik Mamberamo Tengah Timur, terdapat 3 pelanggaran yang bersifat TSM, yakni seorang opnum ASN kantor Distrik MTT atas nama Matias Salem memberikan uang kepada setiap pemilih yang akan masuk mencoblos TPS 01 yang mencoblos Nomor Urut 3, izin, Yang Mulia, ada kesalahan penulisan di daftar alat bukti. Yang dimaksud adalah nomor 3, bukan nomor 4. Akan menerima uang sebesar Rp500.000,00. Dua, melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan. Petugas KPPS TPS 1 Kampung Sikaris secara terbuka berdiri di samping anak-anak yang mereka mencoblos dan mengarahkan mereka untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 04. KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan Formulir C-1 KWK kepada Saksi Pemohon.
3. Distrik Mamberamo Tengah, terjadi 3 pelanggaran yang bersifat TSM. Terdapat pemilihan siluman yang menggunakan undangan atas nama pemilihan lain untuk melakukan pencoblosan. Terdapat manipulasi data pada formulir model D hasil kecamatan KWK. Halaman 4.1, berupa perubahan hasil rekapitulasi, mengubah perolehan suara Pasangan Nomor 04 yang awalnya berjumlah 963 menjadi 1.563. Dalam hal ini, petugas KPPS dan di seluruh Distrik Mamberamo Tengah juga tidak memberikan formulir C-1 KWK yang asli kepada Pemohon.
4. Distrik Rufaer terjadi 9 pelanggaran yang bersifat TSM. Yakni:
 - a. Sebelum pencoblosan dilakukan, telah terjadi dugaan pidana suap oleh Ketua Tim Koalisi Pasangan Nomor Urut 03 yang bernama Banny Kujiro kepada Ketua PPD, Panitia Penyelenggaraan Distrik Rufaer yang bernama Max Krokuko disaksikan oleh Saudara Koresio, Anggota PPD. Seperti yang tadi saya informasikan, Yang Mulia, beberapa hari yang lalu sudah diputus di tingkat pertama pengadilan di Jayapura.
 - b. Petugas KPPS TPS 1 Kampung Mayadi, melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang pemilihnya tidak hadir saat dipanggil namanya.
 - c. Terdapat pemilihan di TPS 01 Fona, berupa pemilih yang mengambil surat suara. Mencoblos lebih dari 1 kali. Hal ini telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu, namun ha ... hingga hari ini belum ada ditindaklanjuti. Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada Saksi Pemohon tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan hak

untuk mendapatkan formulir C-1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.

- d. Bahwa Ketua Tim Sukses Nomor Urut 04 bernama Lukas Foi mengancam dan mengusir Ketua Tim Koalisi Pemohon Saudara Matius Fuyeri yang juga adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dari TPS 1. Demi keselamatan nyawanya, Saudara Matius Fuyeri akhirnya menung ... meninggalkan lokasi pemungutan suara.
 - e. Bahwa Saudara Esau Foi yang merupakan anggota dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 04 mengambil seikat kertas suara dan mencobloskan ... mencoblos sendiri di TPS 1 Kampung Tayai. Bahwa petugas KPS ... KPPS di Kampung Tayai memberikan sejumlah kertas suara kepada Tim Sukses Pasangan Nomor 04 yang kemudian membawa surat ... surat suara tersebut ke bilik dan mencoblos di dalamnya yang sudah terdapat KPPS atau petugas lainnya.
5. Distrik Kampung Sawai. Terjadi 3 pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Antara lain, pada saat proses penghitungan suara di tingkat Distrik Kampung Sawai, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tidak diberikan kepada Saksi Pemohon. Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Sorabi terdapat kelebihan suara sebanyak 9 lembar yang tersisa. Petugas KPPS lalu meminta semua surat suara yang tersisa untuk dicoblos oleh masing-masing saksi pasangan calon. Bahwa Saksi Permohonan tidak diberikan formulir C-1 KWK yang asli oleh petugas PPS ... KPPS di seluruh TPS Distrik Kampung Sawai. Jika ditotal untuk pelanggaran, maka kami dapat berkesimpulan bahwa terjadi 20 pelanggaran besar yang terjadi.

Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati, terdapat dugaan politik uang di Pilkada Kabupaten Mamberano Raya. Telah kami laporkan kepada Bawaslu sebelum hari pencoblosan, namun Termohon tidak bergerak cepat untuk memastikan Pilkada berjalan bersih dari politik uang karena sekalipun laporan telah disampaikan sebelumnya pencoblosan, penonaktifan kepada Ketua PPD Distrik Rufaer, Max Krakuro justru baru dilakukan setelah pencoblosan selesai. Hal ini membuat pelaporan sebagai partisipasi warga untuk memastikan Pilkada berjalan bersih menjadi sia-sia. Saat ini proses hukum masih berjalan dan telah dilakukan putusan pengadilan beberapa hari yang lalu.

Kesimpulan lainnya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masih dapat terlihat dari tidak diberikannya formulir C-1 KWK oleh petugas PPS atau KPPS di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya.

Sulit rasanya untuk melihat sebagai suatu kealpaan belaka serta temuan-temuan yang tersedia justru menunjukkan dugaan keterlibatan aktif Termohon sebagai aktor dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bahwa praktik politik uang telah berulang kali terjadi di Mamberamo Raya. Di Pilkada sebelumnya dan terhadap juga dilakukang penangkapan, pelaporan bahkan sudah terjadi ... menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat mengenai praktik politik uang dan keterlibatan perusaha ... dalam praktik ini.

Hal ini juga telah merugikan Pemohon pada Pemilihan Kepala Daerah 2015, hingga Pemohon harus melalui proses PHPU di MK dan melaksanakan PSU sebanyak 3 kali sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pemenang, dilantik sebagai bupati dan wakil bupati periode sebelumnya. Namun, sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktik ini. Menurut Pemohon ini adalah saatnya praktik kotor tersebut dihentikan, sehingga budaya demokrasi di Mamberamo Raya dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Majelis Yang Mulia. Sebelum kami selaku Kuasa Hukum membacakan petitum dari Pemohon ini, maka izinkan Prinsipal untuk menyampaikan hal-hal terkait permohonan sebagai berikut. Izin, Yang Mulia.

6. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya diperhatikan!

7. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia. Izin, Prinsipal kami daring dari Kota Jayapura.

8. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, tapi waktunya diperhatikan. Silakan!

9. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Saudara Namon? Prinsipal ada?

10. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu, dua kalimatlah. Kan sudah jelas itu di permohonannya.

11. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Baik, siap, Yang Mulia.

12. **KETUA: ANWAR USMAN**

Mana? Belum sambung? Waktu sisa 2 menit.

13. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Baik. Siap, Yang Mulia. Yang saya lanjutkan dianggap dibacakan. Pokok perkara 27 sampai 32, Yang Mulia untuk Prinsipal. Majelis Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Setelah paparan di atas, tiba kami pada bagian dari tuntutan permohonan ini, yakni berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan sela, mengabulkan permohonan Pemohon dalam putusan sela untuk seluruhnya. Memerintahkan penundaan atas berlakunya keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL dan seterusnya tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil dan seterusnya.

Hingga putusan atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif pemilihan Bupati, Wakil Kabupaten Mamberamo Raya 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.

Tiga, memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil putusan atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif (...)

14. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara bacakan saja petitum yang ada dalam ... sesuai dengan ini perbaikan.

15. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

16. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan menambah-nambahkan!

17. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

Dalam pokok perkara. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200 dan seterusnya.

Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya selambat-lambatnya 4 bulan sejak putusan ini. Atau membatalkan penetapan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Bawaslu diputus terbukti dinyatakan bersalah melakukan kecurangan politik uang oleh Bawaslu.

Menyatakan menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pihak memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sebagai berikut dianggap dibacakan.

Enam. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor Urut 1 atas Nama Dorinus Dasinapa, AKS, S.Sos. dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Yang Mulia, untuk waktunya.

18. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, ada konfirmasi atau cacatan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams!

19. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Majelis. Ini Pemohon mengajukan permohonan secara online, ya?

20. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

21. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, namun berkas asli belum diajukan. Oleh sebab itu, fisik aslinya permohonan awal ini diajukan tanggal 19 itu harus ada, ya?

22. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia. Sudah diajukan, sudah teregister.

23. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya.

24. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Tanggal 12 Januari dan 23 bulan 12.

25. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah ada yang asli, ya?

26. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

27. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ya, saya kira itu saja.

28. **KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny?

29. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, Saudara Kuasa Pemohon?

30. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

31. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya ingin konfirmasi lagi, ya, kapan terkait dengan SK penetapan hasil rekapitulasi KPU itu?

32. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

33. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Disampaikan tanggal berapa?

34. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia. Tanggal 13 sampai 17 Desember.

35. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak. Yang ditetapkan langsung SK?

36. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Ditetapkan tanggal 16, Yang Mulia.

37. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 16?

38. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

39. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Desember, jam?

40. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Kalau di SK KPU-nya tanggal 13, pukul 13.45, tetapi waktu kita mengikuti sampai pukul 03.00 waktu itu, Yang Mulia.

41. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**
Diumumkan langsung di situ?
42. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**
Siap, Yang Mulia.
43. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**
Diumumkannya jam berapa?
44. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**
Sekitar pukul 03.00, Yang Mulia.
45. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**
Pukul 03.00 diumumkan. Diumumkan di mana itu?
46. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**
Di Kasonaweja, Mamberamo Raya.
47. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**
Di papan atau di tempat khusus atau di mana atau (...)
48. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**
Di rapat pleno, Yang Mulia.
49. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**
Rapat pleno langsung diumumkan hasilnya?
50. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**
Siap.

51. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 03.00, ya?

52. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

53. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 03.00 itu pukul 15.00 begitu, ya?

54. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

55. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 15.00, ya. Kemudian, Anda menyampaikan permohonan awal tanggal berapa?

56. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Saya lakukan permohonan awal secara online 2 hari setelah itu, Yang Mulia.

57. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda baca kan, itu Pasal 157 ayat (5), ya?

58. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

59. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kapan harus menyampaikan permohonan, ya? Yaitu dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil itu, ya.

60. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

61. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu kapan Anda sampaikan?

62. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Setelah hari penetapan (...)

63. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggalnya saja! Tanggal berapa?

64. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Sebentar, Yang Mulia, tanggal 19, Yang Mulia.

65. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 19 Desember (...)

66. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Jam 3 subuh ... ya (...)

67. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam?

68. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Jam 3, Yang Mulia.

69. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu online, ya?

70. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Online. Siap, Yang Mulia.

71. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Online kan bisa dilihat dari tanda tanggal pengirimannya

72. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

73. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa?

74. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Di sini kita teregister waktu itu pukul 03.06 WIB. Jadi, kalau kita di Papua, 4 ... 5 ... jam 6.

75. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam 6 apa?

76. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Jam 6 wak ... pagi, Pak ... pagi, Yang Mulia.

77. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 06.00 pagi itu?

78. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Ya, siap.

79. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan pukul 00.26?

80. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Bukan, Yang Mulia.

81. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda meng ... mengirimkannya jam segitu, ya?

82. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

83. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 06.00 WIB, ya? Pagi, ya?

84. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Ya, kalau di Mahkamah Konstitusi teregister Waktu Indonesia Bagian Barat, Yang Mulia.

85. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya tanya yang di sana saja.

86. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

87. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya jam 06,00 WIB, ya? Anda sudah paham ya mengenai Pasal 157 ayat (5), ya?

88. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

89. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, perbaikan permohonan Anda kirimkan kapan?

90. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Perbaikan permohonan kita teregister tanggal 18 Januari 2021.

91. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

18 Januari, ya?

92. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Ya.

93. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi ini penting (...)

94. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Izin ... izin, Yang Mulia, perbaikan permohonan tanggal 23 bulan 12.

95. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 23 Januari (...)

96. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Pukul 23.28 WIB.

97. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

23 ... 23 apa? Desember, ya?

98. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Ya, siap, Yang Mulia. Langsung kita perbaikan di Jakarta, Yang Mulia.

99. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di Jakarta, ya? Jadi, terkait dengan permohonan ini silakan nanti KPU menyikapinya, Mahkamah yang akan menilai, ya? Baik itu permohonan yang disampaikan permohonan awal maupun terkait dengan perbaikan permohonan, ya?

100. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Terima kasih, Yang Mulia.

101. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oleh karena itu, ini penting bagi kami untuk kemudian menyampaikan dengan ... sekali lagi mengonfirmasi soal-soal seperti ini, ya?

102. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

103. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

104. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Terima kasih, Yang Mulia.

105. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Minta ketegasan, tadi disebutkan (...)

106. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap (...)

107. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Itu yang ... yang permohonan awal yang online itu menurut Kepaniteraan belum kita terima fisiknya. Kapan diserahkan?

108. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia, ini DK P-3 ini sudah teregister, kami ... tanggal ... Sabtu, 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB.

109. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, fisik asli dari permohonan awal itu, Saudara kirimnya melalui online kan, ya? Nah, sekarang di Kepaniteraan belum menerima berkas fisik asli itu.

110. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia, sudah saya serahkan, Yang Mulia.

111. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Coba nanti di ... di ini lagi, ya?

112. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

113. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, Kuasa Pemohon, ya (...)

114. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap (...)

115. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan nanti Saudara berhubungan dengan Kepaniteraan untuk menyampaikan yang aslinya (...)

116. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, terima kasih, Yang Mulia (...)

117. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena memang kalau dibaca dari online, kemudian di-scan itu enggak kelihatan.

118. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

119. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya kabur sekali di situ, ya?

120. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap.

121. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong sampaikan nanti yang asli, ya? Terima kasih.

122. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Terima kasih, Yang Mulia.

123. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk alat bukti dari Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-22, benar?

124. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021: BILLY MARCELINO MANIAGASI**

Siap, Yang Mulia.

125. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya dalam Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 ada permohonan menjadi Pihak Terkait, Majelis Panel telah menetapkan:

1. Menerima DR. (HC) John Tabo, S.E., MBA., dan Ever Mudumi, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara Konstitusi elektronik.

Jadi, permohonan untuk menjadi Pihak Terkait sudah dikabulkan. Sekarang langsung ke Pemohon Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan! Waktu sekitar 10 menit.

126. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Pemohon Paslon Nomor 2, saya langsung ... apa namanya ... masuk ke pokok permohonan. Sori, Yang Mulia, saya langsung baca ke kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 (...)

127. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dianggap dibacakan.

128. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Dianggap dibacakan, bahwa pemo ... permohonan Pemohon adalah perkara pembatalan rekapitulasi dan penetapan hasil pemil (...)

129. **KETUA: ANWAR USMAN**

Kewenangan Mahkamah itu lewat saja, langsung (...)

130. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia. Poin ke-2, kedudukan hukum Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020) menyatakan Pemohon dalam perkara persidangan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati.

b. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PO.02.3-KPT/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan ... tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 24 Desember 2020. Memohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2.

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.5-Kpt/9120/KPU/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020.

3. Tenggang waktu permohonan, dianggap telah dibacakan.

4. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut.

1) Nama pasangan calon Dorinus Dasinapa dan andi ... Andi P. Maay perolehan suara=4.929 suara

2) Robby W. Rumansara dan Lukas J. Puny, perolehan suara=6.015 suara

3) Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti ... John Tabo dan Ever ... Ever Mudumi=8.577 suara.

Total suara sah=25.136 suara.

Berdasarkan tabel di atas, menurut Hasil Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.5-Kpt/9120/KPU/Kab/XII/2020 bahwa suara Pemohon ditetapkan perolehan suara sebanyak 6.015 suara, dan ditetapkan peringkat kedua dari seluruh pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Berdasarkan hasil pantauan dan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi secara menyeluruh, maka Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan suara sah sebagai berikut.

1) Pasangan ... nama pasangan calon Dorinus Dasinapa dan Andi Maay peroleh ... memperoleh suara sebanyak=5.013 suara.

2) Robby W. Rumansara dan Lukas J. Puny=6.108 suara.

3) Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti=4.843 suara.

4) John Tabo dan Ever Mudumi=8.386 suara.

Total suara sah=23.843 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di tiap-tiap TPS yang dihimpun oleh Pihak Pemohon, maka jumlah total suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2=6.108 suara 6.000 ... sori ... 6.108 suara. Sedangkan catatan-catatan ... sedangkan catatan-catatan formulir C-1 yang belum diberikan oleh pihak penyelenggara oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui saksi-saksi di tingkat TPS, diduga telah terjadi penggelembungan suara pasangan calon lain yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya. Sehingga demi tegaknya tiang konstitusi dan keadilan hukum mohon kiranya Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran-pelanggaran ... pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud.

3. Bahwa dapat kami jelaskan, sesuai dalil-dalil di atas, bukti calinan ... salinan C hasil yang diterima oleh Pemohon melalui oleh para saksi-saksi di tingkat TPS, tercatat hanya sebanyak 21 rangkap. Sedangkan salinan C hasil yang tidak diberikan oleh penyelenggara (Termohon) adalah sebanyak 106 lembar. Maka kemudian Pemohon menganggap layak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Dari peristiwa hukum terkait proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2, secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan selanjutnya apa yang menjadi temuan Pemohon sehingga diduga terdapat banyak kecurangan-kecurangan adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukan perhitungan suara di tingkat TPS, yakni di TPS 08, TPS 09 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 distrik lainnya yakni Distrik Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu, dan Distrik Rufaer, diduga keras telah terjadi pelanggaran dimana pihak kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan sali ... salinan C hasil kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa telah terjadi hal-hal terkait pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon melalui perangkat-perangkat, baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dapat kami uraikan sebagai berikut.

Nama TPS, DPT, saksi.

a) Distrik Mamberamo Tengah

1) TPS 01, Saksi Lukas Merne ... sori ... terjadinya keributan dikarenakan ada salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih, namun setelah hak suara diberikan, pihak pasangan calon nomor urut ... Urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai 1 orang anggota Brimob yang terkena anak panah.

2) TPS 1 Kasonaweja, DPT 293, nama saksi Wempi Sarbunan. Ditemukan ada beberapa pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat undangan berupa C-6, dimana C-6 yang dimaksud telah digunakan oleh orang lain, sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka, tidak dapat menggunakan suaranya untuk memilih.

TPS 02 Kabupaten Kasonaweja jumlah DPT 290, nama saksi Nurdin Tasriq (...)

131. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa Pemohon, bisa enggak, diringkas tabelnya ini? Karena ini kan agak banyak ya, kalau dibaca satu-satu, ya.

132. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

133. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di halaman 14, tolong Anda ringkas, coba!

134. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

135. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya terbatas ini. Waktunya tinggal (...)

136. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, saya langsung ke nomor 5.

5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada, Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan-kecurangan pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari badan pengawas pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Pihak Terkait 1) terhadap pengawasan yang dilakukan di tingkat distrik dan TPS-TPS, sehingga berdampak pada hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bahwa setelah Pemohon menemukan rangkaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran di tingkat TPS pada masing-masing distrik, sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.45 WIT, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, bukti surat pengaduan dan tanda terima, terlampir. Namun, pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dan pada tanggal 16 Desember 2020, saat rapat penghitungan suara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut bahwa terkait surat pengaduan pelanggaran yang kami layangkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu yang bersamaan surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua. Sehingga pada tanggal 13 Desember 2020, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua atas nama

Fransisco Tunjanan dengan didampingi ajudannya dalam rangka menindaklanjuti surat tembusan pengaduan, tiba-tiba pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 01.30 dini hari di tempat penginapan sekelompok massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendatangi dan mengancam untuk meninggalkan Mamberamo Raya.

- b. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut diatas, Pemohon menganggap perlu untuk menarik Pihak Terkait 2 agar dapat menguji dan memeriksa dibuka di persidangan Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa apa yang menjadi penjelasan-penjelasan dan/atau uraian-uraian dari Pemohon terkait keterlibatan Pihak Terkait 2 yang telah mempengaruhi dan diduga menjadi pelaku pelanggaran yang terjadi di seluruh distrik Kabupaten Mamberamo Raya, maka dianggap perlu Pihak Terkait 2 untuk diperiksa di muka persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga pasangan calon bupati dan wakil bupati juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kiranya memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagai gerbang akhir konstitusi dari para pencari keadilan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-KPT/9120/KPU/Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan hari Rabu, 16 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-KPT/9120/KPU/KAB/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1=4.929 suara
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2=7.555 suara
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3=5.615 suara
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4=7.037 suaraTotal suara sah 25.136 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum ... memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini. Atau:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-KPT/9120/KPU/KAB/XII/2020 tentang Rekapitulasi

dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020.

3. Memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

137. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada konfirmasi atau catatan? Silakan, Yang Mulia!

138. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, ini untuk Surat Kuasa, ya?

139. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

140. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pertama, ini surat kuasa ini ada 2. Pertama, yang nomor 210 tanpa tanggal, tapi diterima di MK secara online, 23 Desember 2020, pukul 04.57 WIB. Kemudian, pada tanggal 19 Desember, ada tanggal ... ada di surat kuasa nomor 1 2007 SKK, tanggal 19 Desember, diterima di MK secara online, Sabtu, 19 Desember 2020. Nah, ini mana yang mau digunakan?

Nah, yang kedua, kedua-duanya belum ada berkas fisiknya.

141. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

142. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Izin, Yang Mulia, untuk surat kuasa kita pakai surat kuasa yang terakhir. Jadi, surat kuasa pertama anggotanya meleburkan ke surat kuasa yang kedua. Izin, Yang Mulia, untuk yang aslinya masih kita ... nanti setelah sidang ini akan kita serahkan berkasnya, fisiknya.

143. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kalau yang di pertama itu kan kuasanya ada (...)

144. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

4 orang.

145. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

4 orang. Kalau yang sekarang ini 9.

146. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Sembilan. Ya. Jadi, dari yang pertama tadi itu menggabungkan ke yang kedua.

147. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, tapi tidak semuanya, kan?

148. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Tidak semua, ada 2 orang yang belum gabung.

149. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Jadi, nanti yang akan digunakan adalah?

150. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Surat kuasa yang kedua, Yang Mulia.

151. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Surat kuasa yang kedua nomor 1 2007 itu, ya?

152. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Ya, Yang Mulia.

153. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Fisiknya juga diserahkan.

154. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Sudah siap. Nanti habis sidang kita serahkan, Yang Mulia.

155. **HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Saya kira itu saja.

156. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada?

157. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya sedikit saja. Konfirmasi soal waktu, ya.

158. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

159. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Kuasa Pemohon menjelaskan singkat saja. Penetapan hasil rekapitulasi tanggal berapa tadi? Diulangi lagi! Pasti kan sama dengan Pemohonnya.

160. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Sama, 16 Desember 2020.

161. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember, ya. Jam berapa?

162. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Kalau di surat SK-nya pukul 13.45 WIT, Bu.

163. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa?

164. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Kalau di SK-nya pukul 13.45 WIT.

165. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara mengetahuinya tanggal ... jam berapa?

166. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Kita membuat ini berdasarkan data yang ada dari surat SK.

167. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Seketika itu juga?

168. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Ya, Yang Mulia.

169. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi Saudara tahu pada tanggal 16 Desember, jam?

170. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

13.45 WIT.

171. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

13.45 WIT.

172. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

12 berapa?

173. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

13.45 WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur).

174. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

13.45 WIT itu langsung diumumkan di situ?

175. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Ya, di surat SK-nya ditulis begitu.

176. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan di situ, ya. Saudara mengajukan perbaikan ... permohonan awal tanggal berapa? Permohonan awalnya?

177. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Tanggal 18 Desember, Jumat, 18 Desember.

178. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jangan salah, jangan kalau, ini harus pasti. Tanggal berapa Anda mengajukan permohonan awalnya? Permohonan awal.

179. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Tanggal 18 Desember, Yang Mulia.

180. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal?

181. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

18 Desember, Yang Mulia.

182. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

18 Desember?

183. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Ya.

184. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul itu?

185. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Ya, Yang Mulia.

186. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda kirim ya, lewat online?

187. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Online, Yang Mulia.

188. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kirim tanggal berapa?

189. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Dikirim itu (...)

190. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Secara online tanggal berapa Anda kirim?

191. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Tanggal 18 Desember, Yang Mulia.

192. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan 19 Desember?

193. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Sori, tanggal 19 Desember, Yang Mulia.

194. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, 19 Desember. Jangan salah-salah, ya?

195. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

196. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda kirim lewat online tanggal 19 Desember, jam berapa?

197. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Kalau enggak salah itu (...)

198. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Anda "tut" begitu, kirim itu jam berapa?

199. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Pukul 00.12 WIT, Yang Mulia.

200. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

00.26, ya?

201. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Ya, 00.26, Yang Mulia.

202. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Waktu Indonesia Bagian Timur, ya. Kemudian, perbaikan permohonan online juga?

203. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Online juga, Yang Mulia.

204. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Online juga, Yang Mulia.

205. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Online. Anda kirim kapan onlinenya?

206. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Hari Rabu, selesainya sekitar pukul 05.00 pagi, Yang Mulia, setelah subuh, begitu.

207. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 23?

208. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Pokoknya hari Rabu, tanggal 23, jam persisnya enggak ingat, tapi yang jelas sekitar pukul 05.00 pagi karena kita dari pukul 12.00 malam begini, begini, akhirnya pukul 05.00 baru muncul pernyataan.

209. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik, ini hanya saya ingin konfirmasi saja, nanti silakan saja KPU yang menyikapi, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

210. **KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemohon mengajukan bukti dalam perkara ini P-1 sampai dengan P-40, benar?

211. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

1, 22, Yang Mulia.

212. **KETUA: ANWAR USMAN**

Hm? P-1 sampai dengan P-40.

213. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Izin, Yang Mulia, bukti kita P-1 sampai P-22.

214. **KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi ... oh, jadi bukti fisik belum diserahkan? Betul? Jadi, yang sudah diserahkan, ya, P-1 sampai dengan P-22?

215. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Ya, rencana hari ini mau disampaikan.

216. **KETUA: ANWAR USMAN**

Oke. Daftar alat bukti juga belum diserahkan, ya.

217. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Ya, sama.

218. **KETUA: ANWAR USMAN**

Bukti video, yaitu yang 38 sampai dengan 40 tidak ada. Ya, nanti, ya? Makanya nanti disesuaikan, ya? Habis sidang ini dengan Kepaniteraan.

219. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Siap, Yang Mulia.

220. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Siap, Yang Mulia.

221. **KETUA: ANWAR USMAN**

Yang pasti, P-1 sampai P-22, ya? Nanti kalau ada bukti tambahan ya, diajukan saja lagi karena kenyataannya itu sampai P-40. Tapi memang fisiknya belum ada. Baik. Ya.

222. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya mohon nanti disampaikan Surat Kuasa asli, ya.

223. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Siap ... siap, Yang Mulia, siap.

224. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang belum Anda sampaikan memang kasih online kemarin.

225. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: ACHMAD HUSEIN BORUT**

Ya.

226. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan disampaikan yang asli semua, ya.

227. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: YOFNEDI**

Siap.

228. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih.

229. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, P-1 sampai dengan P-22, ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu, dalam perkara ini juga ada permohonan sebagai Pihak Terkait. Sama dengan perkara sebelumnya tadi, sehingga Mahkamah telah menetapkan:

Satu, menerima Dr. John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 72 dan seterusnya. Yang kedua, sama juga. Dengan amar yang di atas tadi.

Untuk perkara selanjutnya ya, Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021, jadi Kuasa Hukum maupun Prinsipalnya tidak hadir, sehingga Mahkamah menyatakan permohonan itu gugur. Nanti akan diputus dalam waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, acara selanjutnya untuk penundaan, yaitu perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 dan 72/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Catatan:

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, disampaikan di sidang pemeriksaan sesuai dengan penundaan tadi.
2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk bukti tambahan tadi, ya. Nanti habis sidang ini selesai bisa dikonfirmasi kembali atau diserahkan Kepaniteraan.
3. Kemudian, ketetapan Pihak Terkait disampaikan kepada para pihak. Artinya Pihak Terkait melalui e-mail dan WA.
4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Jadi tidak ada lagi surat menyurat dari Mahkamah Konstitusi.

Untuk Perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021, hasil persidangan ini akan disampaikan dalam RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim untuk kelanjutan perkara tersebut. Sidang selanjutnya akan ditentukan

kemudian dan menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi untuk perkara yang 35/PHP.BUP-XIX/2021 tadi.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi tidak akan menerbitkan permohonan sebagai Pihak Terkait karena per ... Pihak Terkaitnya tidak hadir. Termohonnya tidak hadir. Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait tidak perlu menyampaikan jawaban atau keterangan untuk perkara tadi ya, Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021. Cukup, ya? Cukup sudah? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.26 WIB

Jakarta, 29 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

